

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 oleh pemerintah, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah tersebut didasarkan pada kenyataan dan bertanggung jawab dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah maka diharapkan agar daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, sehingga pemerintah daerah terus berusaha dalam meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri (Haryono, 2015).

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah supaya dapat optimal, maka diperlukan biaya yang cukup. Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan efektif dan efisien tanpa biaya untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sebagian biaya tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa pendapatan asli daerah yang mencakupi kepentingan rumah tangganya sendiri (Anggraini, 2015). Untuk mendukung hal tersebut, maka setiap daerah harus mampu menggali dan

mendayagunakan sumber-sumber keuangan asli daerah. Dengan demikian pendapatan asli daerah yang cukup, maka dapat dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan guna memakmurkan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan (Handoko, 2012).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) begitu penting karena merupakan sumber pendapatan yang membantu meningkatkan keuangan daerah itu sendiri. Dari hasil penerimaan ini daerah memiliki kekuasaan penuh dalam mengelola penggunaannya untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari beberapa hasil penerimaan daerah tersebut yang paling sentral selain pajak adalah retribusi, sumbangan retribusi bagi anggaran pemerintah daerah sangat besar, sehingga peran retribusi begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor ini melalui upaya-upaya dalam memaksimalkan pendapatan retribusi. Upaya ini dilakukan agar penerimaan daerah dari retribusi dari tahun ke tahun terus meningkat (Haryono, 2015).

Retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah: “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Salah satu komponen retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar adalah retribusi atas fasilitas pasar tradisional yang berupa peralatan atau los yang dikelola oleh pemerintah daerah yang khusus disediakan oleh pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar. (Kesit, Bambang, 2005:135). Berdasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar . Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.

Retribusi pasar memberikan peranan yang cukup untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Hal ini dikarenakan keberadaan pasar yang pasti ada di setiap daerah yang jumlahnya cukup. Di pasar tersebut pasti terjadi transaksi setiap hari atau pada hari-hari tertentu dan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut dipungut biaya karena menggunakan pasar sebagai tempat transaksi (Toduho dkk, 2014).

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Perda Kabupaten Karanganyar No. 10 Tahun 2006). Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar akan terjadi suatu perputaran uang yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah harus dapat membiayai pembangunan yang ada dan dapat mengelola sumber-sumber PAD secara tepat. Salah satu sumber pendapatan asli daerah dari hasil retribusi ialah retribusi pasar. Penerimaan retribusi pasar dari beberapa pasar-pasar besar yang ada di Kabupaten Karanganyar memberikan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Karanganyar.

Penelitian sebelumnya dari Anggraini, Saifi dan Achmad Husaini (2015) yang mengungkapkan bahwa rasio kontribusi retribusi pelayanan pasar Tanjung terhadap retribusi daerah Kota Mojokerto tahun 2009-2012 berada pada indikator sangat kurang, sedangkan rasio efektifitas mengalami fluktuasi dari tahun 2009 sampai 2012 dan laju pertumbuhan retribusi pelayanan pasar berada pada kategori tidak berhasil karena pertumbuhan hanya terjadi pada tahun 2012 sebesar 9,7%.

Selanjutnya menurut Shintia (2011) menyatakan bahwa dari tren lima tahun 2005-2009 terlihat bahwa retribusi pasar di pasar Kuripan Baru cenderung turun. Retribusi tidak optimal karena Dinas Pengelola Pasar masih terkendala dalam hal kurangnya aparat petugas pemungut retribusi. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Kuripan terlihat dari pedagang masih ada yang sering menunggak, kurangnya aparat UPTD yang bertugas, tidak adanya fasilitas pendukung bagi petugas, insentif atau biaya penunjang bagi pemungut serta ketidakcakapan petugas dalam berinteraksi dengan pedagang.

Selain itu, Lestari (2016) menyimpulkan bahwa presentase kontribusi dari Retribusi Pasar Segiri yang diberikan masih kecil di bawah 1% hal ini disebabkan dari realisasi penerimaan Retribusi Pasar Segiri yang tidak besar dan tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya hambatan dari pihak yang melakukan pemungutan retribusi dan yang dipungut retribusi yaitu pedagang.

Dengan demikian peneliti tertarik mengangkat tema retribusi pasar karena melihat proporsi penerimaan dari retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan di samping itu peneliti mengambil tema retribusi pasar sebagai objek penelitian untuk mengetahui seberapa besar kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar dari penganggaran empat tahun terakhir. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul “ANALISIS POTENSI RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KARANGANYAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini menganalisa tentang Analisis Potensi Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. Sehingga penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya?

2. Bagaimana tingkat kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerimaan retribusi pasar yang ada di Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya.
2. Untuk mendeskripsikan tingkat kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengidentifikasi faktor yang menghambat dan mendukung penerimaan retribusi pasar yang ada di Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada banyak pihak, diantara lain :

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karanganyar, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, meningkatkan pembinaan dan penertiban potensi retribusi pasar di tahun-tahun yang akan datang.

2. Bagi penulis, digunakan untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat dalam hal akuntansi sektor publik khususnya retribusi daerah yaitu salah satunya potensi retribusi pasar.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan tambahan informasi untuk penelitian berikutnya khususnya mengenai potensi retribusi pasar dan kontribusinya di Kabupaten Karanganyar.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman penelitian, sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang berisi tentang masalah-masalah atau issue yang mendasari penelitian. Selanjutnya akan dibahas mengenai rumusan masalah yaitu masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis. Dalam bab ini juga dipaparkan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi berisi urutan-urutan penyusunan dan penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan teoritis dari variabel dependen, variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, didalamnya berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, dan sampel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai penyajian dan analisis data serta penjelasan mengenai hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian.